

BAB III

PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mekanisme akuntabilitas social berbasis budaya lokal dalam pembangunan di Desas Caturtunggal pada tahun 2017 dengan melihat dari beberapa indikator sebagai berikut.

A. Kemampuan Kepala Desa Dalam Menempatkan Masyarakat Sebagai Warga Negara

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah membahas desa secara rinci dan jelas dalam kedudukan ataupun pelaksanaannya. Dalam peraturan tersebut juga secara jelas tentang tugas Kepala Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan urusan pembangunan desa, dan urusan kemasyarakatan yang dilihat dengan indikator sebagai berikut :

a) Kepemimpinan

Kepemimpinan dalam karakteristik sifat dijelaskan bahwa seseorang memiliki kepekaan inisiatif, mempunyai rangsangan emosional, mudah berkomunikasi, kreatif dalam menenukan gagasan baru, mempunyai persepsi positif serta jalan keluar setiap masalah dan selalu berpartisipasi dalam setiap kegiatan orang lain (Syafiie, 2015). Gaya kepemimpinan seorang kepala desa dapat tergambar dari bagaimana ia mengambil sikap dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Kepala Desa Caturtunggal telah melakukan peranannya sebagai pemimpin desa serta administrator jalannya pemerintahan desa Caturtunggal, dengan menerapkan gaya kepemimpinan partisipatif dengan pendekatan interaksi dalam bentuk arahan.

Kepala desa caturtunggal dengan gaya kepemimpinan partisipatif memiliki kegiatan rutin bersama masyarakat dalam menunjang sistem kepemimpinannya. Dilihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3.1

Jadwal Sambang Padukuhan Tahun 2017

No	Tanggal	Padukuhan
1.	2/01/2017	Padukuhan kledokan
2.	5/02/2017	Padukuhan blimbingsari
3.	13/03/2017	Padukuhan manggung
4.	16/04/2017	Padukuhan manggungsari
5.	28/05/2017	Padukuhan karangmalang
6.	20/06/2017	Padukuhan samironio
7.	25/07/2017	Padukuhan gowok
8.	26/08/2017	Padukuhan ambarukmo
9.	10/09/2017	Padukuhan samirono

(Sumber : Sekretariat Kelurahan Caturtunggal)

Data data di atas, dapat dijelaskan bahwa kepala desa Caturtunggal telah memiliki jadwal kegiatan bersama masyarakat setiap bulannya. Kegiatan tersebut telah dijadwalkan berbeda setiap padukuhan, dalam tahun 2017 dilihat terdapat 9 padukuhan yang memiliki rutinitas pertemuan bersama kepala desa Caturtunggal.

Dalam pelaksanaan pemerintahan desa Caturtunggal, kepala desa mampu memposisikan dirinya sebagai pemberi arahan kepada masyarakat agar bisa berpartisipasi dalam berbagai program pembangunan desa. Berbagai arahan tersebut dianggap sebagai bentuk komunikasi antara kepala desa kepada masyarakat Desa Caturtunggal, seperti yang diungkapkan dalam wawancara bersama salah satu warga desa Desa Caturtunggal pada tanggal 05 Januari 2019, sebagai berikut.

“Mengenai gaya kepemimpinan kepala desa mbak, beliau seorang yang sangat berpartisipasi terhadap warganya, sering berkomunikasi kalau ada program pembangunan apa saja yang ada di desa, ramah terhadap warganya, setiap 2 minggu sekali beliau dengan jajarannya selalu berkeliling padukuhan untuk mengecek bagaimana kondisi desa, sebenarnya maju atau tidak sebuah desa itu tergantung dengan kepala desanya.”

Dari pernyataan di atas dipahami bahwa Kepala Desa Caturtunggal dengan gaya kepemimpinannya berusaha untuk tetap dekat dengan warga desa Caturtunggal. Beliau beserta jajarannya mengagendakan pemantauan keadaan desa sebagai bentuk evaluasi

sistem pemerintahan yang ia jalankan. Sistem komunikasi yang dijalankan oleh kepala dalam bentuk arahan kepada warga desa dilakukan dalam rangka memberikan pengertian dan pentingnya kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat yang baik dan terarah dalam berbagai hal khususnya pembangunan desa.

Komunikasi kepala desa dalam bentuk arahan oleh Kepala Desa Caturtunggal yaitu berupa dalam bentuk pembinaan, perencanaan, pelaksanaan, penjelasan dan pemahaman dalam berbagai kegiatan pembangunan desa. Gaya kepemimpinan tersebut dimaksudkan dalam rangka menghindari berbagai macam permasalahan seperti perbedaan pendapat antara pemerintah desa dengan masyarakat. Maka menyikapi hal tersebut diadakan arahan untuk dapat bermusyawarah menemukan titik temu permasalahan.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan hasil wawancara bersama salah satu masyarakat desa Caturtunggal yang dilakukan pada tanggal 05 januari 2019, sebagai berikut.

“Dalam pengambilan keputusan Kepala Desa seringkali mengadakan pertemuan dengan masyarakat, tokoh masyarakat dan pemuda karang taruna mbak. Sehingga keputusan yang diambil itu merupakan keputusan bersama dan masyarakat juga membantu Kepala Desa mengaharapkan desa yang maju. Jadi semuanya saling gotong royong mbak dalam memajukan Desa Caturtunggal ini. Sebenarnya maju atau tidak sebuah Desa itu tergantung pemimpin nya bukan hanya itu aja tapi perlu juga diimbangi dengan dukungan dari masyarakat.”

Dari pendapat yang telah diungkapkan di atas dapat dianalisa bahwa kepala desa Caturtunggal menempatkan musyawarah dengan bentuk pertemuan antara pemerintah desa dengan berbagai tokoh masyarakat sebagai bentuk model pemecahan masalah. Dari adanya pertemuan yang diselenggarakan tersebut akan terjalin komunikasi yang terjadi

terus menerus. Kegiatan yang dilakukan tersebut juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa Caturtunggal.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan yang digunakan oleh Kepala Desa Caturtunggal yaitu komunikasi dalam bentuk arahan kepada masyarakat. Hal tersebut juga dapat meningkatkan kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan desa baik dalam pembangunan ataupun pelaksanaan program lainnya.

b) Pelayanan Sosial

Dijelaskan dalam (Fahrudin, 2011) pelayanan sosial merupakan usaha dalam mempertahankan dan meningkatkan fungsi sosial individu melalui sumber-sumber sosial pendukung dan proses untuk meningkatkan kemampuan. Pelaksanaan pelayanan sosial dilakukan dengan semua sumber yang tersedia sehingga pelayanan yang dilakukan dapat efektif dan efisien. Pelayanan sosial yang dilakukan oleh pemerintah desa Caturtunggal khususnya Kepala Desa sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa memiliki peranan penting dalam meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Pemimpin dapat menciptakan suasana yang harmonis dan mampu memberikan motivasi kepada staf lainnya dalam meningkatkan pelayanan. Seperti yang diungkapkan Kepala Seksi Pelayanan dalam wawancara pada tanggal 07 Januari 2019, sebagai berikut.

“Pelayanan sosial ini bisa dibantu dalam meningkatkan sistem pemerintahan yang ada di Desa Caturtunggal, tentu saja sangat membantu pelayanan sosial ini dalam sistem pemerintahan, karna sistem pemerintahan yang baik juga berasal dari pelayanan sosial yang baik. Pelayanan di Desa Caturtunggal memberikan pelayanan dari administrative, publik, sosial itu semua dari

pemerintah. Begitu juga kami wajib untuk memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat dan masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari kami.”

Pernyataan Kepala Seksi pelayanan diatas mengindikasikan bahwa pemberian pelayanan merupakan salah satu kewajiban yang harus mereka berikan kepada masyarakat. Aktifitas penyelenggaraan pemerintah desa yang mereka berikan sesuai dengan konsep akuntabilitas pemerintahan desa yaitu dari akuntabilitas keuangan, akuntabilitas administratif dan akuntabilitas dalam kebijakan publik.

Pemerintah Desa Caturtunggal telah menyelenggarakan pelayanan selama tahun 2017. Seperti yang dimuat dalam data sebagai berikut.

Tabel 3.1
Data Penyelenggaraan Pelayanan
Pemerintah Desa Caturtunggal Tahun 2017

No	Jenis Pelayanan	Jumlah
1	Pengelolaan Pos Kesehatan Desa dan Polindes (termasuk pengadaan tenaga kesehatan dan lain-lain)	7
2	Pembinaan dan Penyuluhan penyalahgunaan Narkotika dan Zat Aditif (NAPZA)	2
3	Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu (layanan gizi, pemeriksaan bumil, pemberian makanan tambahan, penyuluhan kesehatan, gerakan hidup bersih dan sehat, penimbangan bayi dan gerakan sehat untuk lanjut usia)	4
4	Pembinaan dan Penyuluhan tentang HIV/AIDS	2
5	Fasilitasi Penyuluhan Kesehatan (kesehatan keluarga, penyakit menular, kesehatan jiwa, kesehatan lingkungan, dan lain lain)	4
6	Fasilitasi Kegiatan Bidang Kesehatan (imunisasi, foging, jemantik, pemberantasan sarang nyamuk, dan lain lain)	3
7	Fasilitasi Pembinaan Keluarga Berencana (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, PIK-R, termasuk fasilitasi kader KB desa)	13
8	Fasilitasi Pembinaan Kader KB (IMP, PKBD, Sub PPKBD, dan lain lain)	12
9	Pembinaan Tanaman Obat Keluarga (TOGA)	2

10	Pengelolaan dan Pembinaan PAUD (termasuk pengadaan tenaga pendidik, honorarium pengajar, operasional, dan lain lain)	4
11	Pembinaan dan Operasional PKK Desa dan Padukuhan	36
12	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	2
13	Pembinaan dan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan (pengajian rutin, safari ramadhan/tarling, jumat keliling, dan lain lain)	2
14	Pembinaan dan Operasional Kegiatan Keagamaan Warga (pengajian rutin, remaja masjid, mudika, kegiatan anak shaleh, dan lain lain)	18
15	Pelaksanaan Lomba Desa (Lomba Desa Unggulan, Hatinya PKK, P2WKSS, UPPKS, gerakan sayang ibu/GSI, Dasa Wisma, DBKS, Desa Prima, dan lain lain)	12
16	Pelaksanaan Lomba Desa (Lomba Desa Unggulan, Hatinya PKK, P2WKSS, UPPKS, gerakan sayang ibu/GSI, Dasa Wisma, DBKS, Desa Prima, dan lain lain)	12
17	Penyelenggaraan Peringatan Hari Hari Besar Nasional (Upacara, Lomba Lomba, Sarasehan, Stimulan Peringatan Ke Masyarakat, dan lain lain)	4
18	Fasilitasi Pembinaan Atlet Olah Raga (termasuk operasional kepada kelompok olah raga/kepemudaan)	24
19	Peringatan Hari Olah Raga/Hari Pemuda (upacara, lomba-lomba, sarasehan, stimulan peringatan oleh kelompok pemuda/olahraga)	8
20	Pembentukan dan Pengelolaan Sanggar Seni dan Budaya Desa (termasuk operasional kelompok-kelompok seni dan budaya)	48
21	Pelaksanaan Upacara Adat (merti desa, merti dusun, upacara adat, hari jadi desa, dan lain lain)	8
22	Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Seni dan Budaya Lokal	24
23	Pembentukan dan Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (pelatihan, bimbingan teknis, pengiriman pelatihan, dan lain lain)	28
24	Pembinaan dan Pelatihan bagi Kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anak (termasuk pemberian stimulan untuk kegiatan)	7
25	Pembinaan dan Pelatihan bagi Kelompok Pemuda (termasuk pemberian modal, alat-alat produktif atau stimulan kegiatan)	8
26	Pelatihan Ketrampilan bagi Warga Masyarakat (memasak, membuat, menjahit, pranotocoro, karawitan, bengkel, otomotif, komputer, bahasa, musik, pemusalaran jenazah, dan lain lain)	24
27	Pendataan Keluarga Miskin, Kelompok Rentan, dan Difabel	8

28	Pembinaan dan Pemberian Santunan Sosial kepada Keluarga Miskin	12
29	Pendampingan/Konseling Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	12
30	Fasilitasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Desa dan Padukuhan	4
31	Pembinaan dan Pemberian Penghargaan dan Beasiswa bagi Siswa Berprestasi	12
32	Pembinaan dan Pemberian Stimulan bagi Kegiatan Warga Masyarakat (senam ibu-ibu, senam lansia, olah raga warga, pengajian, dan lain lain)	12
33	Pembinaan dan Pemberian Stimulan Pembangunan bagi Lembaga Non Pemerintah Desa Berskala Desa (TPA, PAUD, mushola, kapel, masjid, TK, dan lain lain)	12
34	Penanganan Orang-Orang Terlantar (Santunan orang terlantar, kecelakaan orang tidak dikenal, Mayat tidak dikenal)	48
35	Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam	48
36	Kegiatan Penanggulangan Bencana Sosial	48
37	Kegiatan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa/Wabah	48
Jumlah Kegiatan		582

(Sumber: Arsip Pemdes Caturtunggal)

Data diatas menunjukkan bahwa sebanyak 582 kegiatan pelayanan oleh pemerintah desa Caturtunggal kepada masyarakat. Dari 37 bentuk pelayanan yang diselenggarakan, terdapat 9 aspek pelayanan yang paling sering dilakukan contohnya seperti Kegiatan Penanggulangan Bencana dan Kejadian serta Pembinaan dan Operasional PKK Desa.

Dalam akuntabilitas administratif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya, Pemerintah Desa Caturtunggal melakukan kewajiban dalam menjalankan tugas diinstruksikan oleh kepala desa dan tugas umum yang terdapat dalam kebijakan daerah dalam rangka penyelesaian kerja secara otoritas atas pelayanan dari sumber daya yang ada sebagai perangkat desa. Telah dijelaskan pula dalam UU Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik yang menuntut harus efektif dan efisien.

Pelayanan sosial yang diberikan pemerintah desa harusnya bersifat prima dan optimal. Harapannya adalah ketika masyarakat membutuhkan pelayanan tersebut akan merasakan kepuasan, sehingga legitimasi masyarakat terhadap pemerintah desa menjadi meningkat dan membaik. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan salah satu warga desa Caturtunggal dalam wawancara pada tanggal 07 Januari 2019, sebagai berikut.

“Saya merasa sangat terbantu dengan pelayanan yang diberikan Desa Caturtunggal, pegawainya juga tidak mempersulit syarat apa saja ketika mau mengurus surat – surat, pegawainya sangat ramah, kadang kalau kesulitan mereka menjelaskan apa yang dibutuhkan, ya memang kadang kita harus menunggu lumayan lama prosesnya mungkin karna sistemnya yang eror, kalau dulu kita mau mengurus surat harus panas-panasan dulu antrinya lumayan banyak. Sekarang setelah di renovasi sudah enak kalau mau mengurus tidak kepanasan lagi ruangnya sudah bagus dari pada yang dulu, di sediakan air minum juga untuk masyarakatnya. Pelayanannya juga sekarang pake nomer antrian jadi tidak saling dahulu-dahuan. Saya pribadi sudah merasakan hak sebagai masyarakat yang saya dapatkan di Desa Caturtunggal ini”.

Dari pernyataan salah satu warga Caturtunggal tersebut dapat dipahami bahwa Pemerintah Desa Caturtunggal telah memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai standar. Adapun standar pelayanan telah ditetapkan dalam PermenPANRB Nomor 15 tahun 2014 yaitu dalam Prosedur, waktu pelayanan, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana serta kompetensi petugas pelayanan. Hasil wawancara diatas juga menjelaskan bahwa fasilitas yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat pengguna layanan sudah membaik. Ketika dulunya mereka harus menunggu antrian layanan dengan kondisi yang kurang nyaman, namun sekarang telah disediakan fasilitas yang semakin nyaman untuk semua kalangan.

Dari beberapa penjelasan di atas tentang pelayanan sosial oleh pemerintah desa Caturtunggal kepada masyarakat, dapat disimpulkan bahwa dalam pemberian pelayanan telah sesuai konsep akuntabilitas pelayanan yaitu secara administratif, keuangan maupun

kebijakan. Dalam penyediaan pelayanan, Pemerintah Desa Caturtunggal juga telah memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam PermenPANRB Nomor 15 tahun 2014.

c) Pelayanan Administrasi

Administrasi umumnya dikenal sebagai unsur yang tidak dapat dipisahkan dengan organisasi dan manajemen. Apabila salah satu unsur tersebut tidak ada maka dalam sebuah sistem tidak akan berjalan. Oleh karena itu peran administrasi sebagai faktor penunjang kerja dalam organisasi dalam berbagai aspek dalam rangka penunjang tujuan organisasi sebagaimana dalam perencanaannya.

Desa Caturtunggal memberikan pelayanan administrasi kepada warganya. Pelayanan administrasi diselenggarakan untuk mempermudah masyarakat ketika mereka membutuhkan kelancaran urusan yang berkaitan secara administrasi dalam berbagai kebutuhan. dapat dilihat dalam data berikut.

Tabel 3.2

Data Pelayanan Adminstrasi Desa Caturtunggal Tahun 2017/2018

No	Pelayanan Administrasi	Tahun 2017	Tahun 2018
1.	Pengantar nikah	34	21
2.	Keterangan KIR/Imunisasi	133	140
3.	Keterangan Tidak mampu (Beasiswa)	86	60
4.	Keterangan Tidak mampu (BPJS)	30	13
5.	Keterangan Janda/Duda	0	1
6.	Surat Keterangan Cerai	4	4
7.	Surat Keterangan Kematian	2	8
8.	Surat Keterangan Menikah	4	6

(Sumber: Sekretariat Kelurahan Caturtunggal)

Data di atas, dapat dijelaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan administrasi oleh Desa Caturtunggal terdapat beberapa pelayanan seperti pelayanan administrasi

pernikahan dan beberapa surat keterangan yang menunjang kebutuhan masyarakat desa Caturtunggal. Dari penyelenggaraan pelayanan tersebut, masyarakat selaku penerima layanan merasa termudahkan segala urusan mereka. Seperti yang dijelaskan dapat hasil wawancara pada tanggal 06 Januari 2019, sebagai berikut.

“Pemerintah desa sudah memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat dan kemudahan untuk mengurus administrasi di desa caturtunggal ini. Sebagai mana pelayanan yang diberikan sekarang ini cepat bisa ditunggu dan tidak harus menunggu lama lagi kalau mau urus surat tidak seperti dulu harus menunggu lama baru jadi suratnya”.

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa pelayanan administrasi yang diberikan oleh pemerintah desa Caturtunggal dianggap dapat memudahkan masyarakat. Dalam penyelenggaraannya, pemerintah desa Caturtunggal memberikan pelayanan yang cepat sehingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan tidak perlu menunggu lama. Hal tersebut juga selaras dengan prinsip new public service dalam pelayanan yang menuntut pelayanan harus cepat dan mudah serta murah kepada masyarakat.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelayanan administrasi, pemerintah desa caturtunggal telah menyelenggarakan beberapa pelayanan untuk menunjang segala kebutuhan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam penyelenggaraannya pula telah diberikan kemudahan dan kecepatan akses pelayanan sehingga masyarakat dapat merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa Caturtunggal.

d) Transparansi oleh Pemerintah kepada Masyarakat

Permendagri nomor 113 Tahun 2014 telah memperkuat adanya proses transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam peraturan tersebut dituntut untuk penerapan kegiatan pencatatan kas masuk maupun keluar yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah. Kegiatan tersebut bisa diterapkan dalam berbagai alat seperti

mengadakan kegiatan forum, pencatatan di papan pengumuman maupun dalam bentuk laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa secara tertulis maupun dalam bentuk elektronik. Hal tersebut dilakukan dalam rangka untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses dengan cepat dan mudah.

Pemerintah Desa Caturtunggal memiliki cara tersendiri dalam melakukan kegiatan transparansi. Pemerintah Desa Caturtunggal khususnya Kepala Desa melakukan kegiatan dengan mengumpulkan warga dalam bentuk forum. Seperti yang dijelaskan dalam wawancara yang dilakukan pada 07 Januari 2019 bersama perangkat desa Caturtunggal, sebagai berikut.

“Kami disini selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk masyarakat Desa Caturtunggal. Kami juga berusaha untuk transparan kepada masyarakat tentang hal apa itu yang menyangkut Desa, mengenai dana desa, APBDes, dana bantuan yang diberikan pemerintah kepada Desa kami. Kami juga selalu memberikan informasi kepada masyarakat kalau ada program atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Biasanya kami menyampaikan laporannya itu ketika lagi ada rembug warga di forum-forum, kita biasanya buat famlet yang berisi tentang anggaran dana yang nantinya famlet itu dibagikan disetiap padukuhan dan nanti di pasang di masing – masing padukuhan sehingga masyarakat dapat mengetahui anggaran dana yang digunakan pemerintah untuk apa saja. Akan tetapi kami belum bisa transparan untuk mengunggah ke website kami dikarenakan keterbatasan tenaga admin yang ada, jadi untuk sementara secara tradisional menyampaikannya.”

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa pemerintah desa Caturtunggal telah melakukan beberapa upaya untuk mengedepankan aspek transparansi. Beberapa kegiatan yang dilakukan dari mengadakan forum bersama warga Caturtunggal, mencetak famplet hasil kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa Caturtunggal dalam hal penggunaan dana. Penggunaan dana sangat penting untuk ditransparansikan pengalokasiannya mengingat sangat sensitif kaitannya dengan kasus korupsi yang marak terjadi. Namun disamping tersebut, Pemerintah Desa Caturtunggal sangat mementingkan transparansi

dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Transparansi dalam bentuk elektronik juga telah diupayakan namun mengingat keterbatasan SDM yang mampu melaksanakan belum tersedia.

Tabel 3.2

Data Anggaran Pembangunan Nonfisik Pemerintah Desa Caturtunggal

No	Perihal	Anggaran (Rp)	Anggaran Total
1	Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu		
	Belanja Barang dan Jasa		61,410,000.00
	Alat Tulis Kantor	600,000.00	
	Belanja Cetak dan Penggandaan	300,000.00	
	Belanja Makanan dan Minuman	1,200,000.00	
	Honorarium narasumber/ahli	1,650,000.00	
	Honorarium Tim Kegiatan	2,160,000.00	
	Pemberian Barang Kpd Masyarakat/Kel Masyarakat	55,500,000.00	
2	Pelaksanaan Upacara Adat		
	Belanja Barang dan Jasa		100,520,000.00
	Alat Tulis Kantor	2,800,000.00	
	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,900,000.00	
	Belanja Makanan dan Minuman	2,800,000.00	
	Honorarium narasumber/ahli	2,700,000.00	
	Honorarium Tim Kegiatan	4,320,000.00	

	Pemberian Barang Kpd Masyarakat/Kel Masyarakat	85,000,000.00	
	Total		161,930,000.00

Data anggaran diatas terdapat total Rp161,930,000.00 untuk melaksanakan dua kegiatan sosial pada masyarakat desa Caturtunggal. Adapun kegiatan tersebut yaitu pengelolaan dan pembinaan posyandu yang dilaksanakan Tim Penggerak PKK Desa Caturtunggal dengan besar anggaran Rp61,410,000.00. kegiatan kedua yaitu pelaksanaan upacara adat yang dilaksanakan oleh masyarakat adat dengan anggaran Rp100,520,000.00.

Dari adanya beberapa kegiatan oleh pemerintah desa dalam rangka mengupayakan aspek transparansi tersebut, terdapat tanggapan baik dari warga desa Caturtunggal. Mereka antusias menerima upaya pemerintah desa dalam menerapkan sistem transparansi. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu warga dalam wawancara pada tanggal 05 Januari 2019, sebagai berikut.

“Pemerintah Desa sudah cukup transparan selama ini, mengenai anggaran apa saja yang dikeluarkan dan digunakan untuk apa saja, pihak pemerintah desa selalu transparan dan menyampaikan laporannya kepada masyarakat melalui perkumpulan warga, ada juga famlet yang disebar setiap padukuhan. Ya karena keterbatasan waktu dan tempat kadang gak semua nya bisa kumpul untuk mendengarkan hasil laporannya, jadi kadang melalui RT dan RW yang menyampaikan hasil dari laporannya.”

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat desa Caturtunggal sebenarnya memiliki antusias yang bagus terhadap upaya pemerintah dalam menerapkan aspek transparansi. Kegiatan pemerintah seperti mengadakan forum sebagai wadah dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban sudah bagus untuk selalu diagendakan bersama waga. Tidak hanya berbentuk penyampaian, pemerintah desa Caturtunggal juga menyediakan arsip untuk dibagikan kepada Kepala RT maupun RW terkait laporan

pertanggungjawaban tersebut agar dapat diakses oleh warga siapa saja yang membutuhkan sewaktu-waktu.

Gambar 3.1

Bentuk Transparansi Oleh Pemerintah Desa Caturtunggal



Sumber: Arsip Desa Caturtunggal

Gambar di atas menunjukkan bahwa sistem transparansi oleh pemerintah desa Caturtunggal dilakukan melalui media cetak dengan memajang baliho di setiap padukuhan. Baliho tersebut menunjukkan anggaran yang disediakan oleh pemerintah desa dalam menunjang sistem pemerintah desa Caturtunggal. Sehingga masyarakat mengetahui dan sebagai media kontrol terhadap pemerintah desa atas pelaksanaan pemerintahan baik dalam pembangunan maupun pemberdayaan.

Beberapa penjelasan di atas tentang upaya transparansi yang dilakukan pemerintah desa Caturtunggal kepada masyarakat dapat disimpulkan bahwa aparat desa Caturtunggal telah menerapkan sistem transparansi dengan membentuk forum bersama

warga sebagai wadah untuk penyampaian laporan pertanggungjawaban. Terhadap upaya tersebut, masyarakat desa Caturtunggal juga memberikan respon yang baik dengan mampu memahami dan menghadiri forum dengan antusias.

B. Kemampuan Masyarakat Dalam Mengelola Informasi dan Penyampaian di Ranah Publik

a) Insidental

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 telah mengatur tentang keterbukaan informasi. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap berbagai penyelenggaraan pemerintahan dan segala sesuatu yang berkaitan dalam kepentingan publik. Dari UU tersebut, maka aspek transparansi oleh pemerintah kepada publik atau masyarakat akan semakin menguat posisi dan peranannya.

Pemerintah desa Caturtunggal telah memberikan kemudahan akses pengelolaan informasi kepada masyarakat. Seperti yang dijelaskan dalam oleh salah satu staff pelayanan pemerintah desa Caturtunggal dalam wawancara pada tanggal 07 Januari 2019, sebagai berikut.

“selama ini saya kira pemdes udah berusaha untuk terbuka dengan masayarakat mengenai segala informasi yang dibutuhkan masyarakat. Ini kita baru aja memperbaruhi websitenya , jadi masyarakat kalau mau mengurus keperluan nya untuk mengenai syaratnya sudah kita cantumin ke website jadi mempermudah buat proses nya dan cepat juga , setiap aktivitas padukuhan juga kita selalu tampilkan , ada agenda acara pun begitu jadi masyarakat biar bsa melihat aktivitas apa aja yang dilakuin padukuhan lain“

Dari pernyataan dalam wawancara tersebut dapat dipahami bahwa pemerintah desa Caturtunggal memberikan kemudahan akses informasi berbasis digital. Mereka menyediakan website sebagai media informasi untuk masyarakat. Dengan adanya media

website tersebut, maka sangat jelas ketika masyarakat membutuhkan informasi terkait pelayanan ataupun hal lainnya akan semakin mudah dan cepat aksesnya.

Dalam kaitannya dengan akuntabilitas, pengelolaan informasi berbasis website juga memudahkan masyarakat dalam fungsi kontroling. Pemerintah desa telah menyampaikan berita-berita tentang kegiatan yang akan maupun telah dilakukan kaitannya secara publik. Disanalah akan terlihat masyarakat mampu mengontrol berbagai kegiatan pemerintah tanpa harus berhubungan langsung dengan pihak terkait secara langsung. Kemudahan akses yang diberikan pemerintah desa Caturtunggal kepada masyarakat telah diterima dengan baik oleh warga desa. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu warga dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 06 Januari 2019, sebagai berikut.

“Ya selama ini saya kira pemerintah sudah transparan terhadap segala informasi yang menjadi hak masyarakat, hanya saja kemaren ada pembenahan jadi ya ada masalah sedikit, sekarang suka dipermudah kok sudah ada website jadi bisa lihat apa saja informasi yang terbaru , ini juga website nya baru diperbaruhi jadi masih suka update jadi gak harus nunggu dulu pengumuman dari RT dan RW kalau mau tau informasi”

Dari pernyataan diatas dapat dijelaskan bahwa masyarakat desa Caturtunggal telah menganggap pemerintah desa Caturtunggal telah transparansi dalam pemberian informasi kepada masyarakat desa. Terbukti dengan adanya website yang sudah mulai diaktifkan sehingga masyarakat ketika membutuhkan pelayanan ataupun mengakses informasi lain akan semakin mudah dan cepat. Adanya website juga menjadi sarana tersendiri dalam memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi sewaktu-waktu tanpa harus mendatangi kantor kepala desa kapan saja dan dimana saja.

Berikut website yang menjadi media transparansi pemerintah desa Caturtunggal untuk masyarakat desa Caturtunggal.

.Gambar 3.2

Halaman Berita Kegiatan Desa Caturtunggal



(Sumber: <https://www.caturtunggal.id/>)

Gambar di atas menunjukkan bahwa penyediaan website yang dikelola oleh pemerintah desa Caturtunggal sebagai media transparansi atas beberapa program yang dilakukan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka penyampaian informasi kegiatan yang telah dilaksanakan dan kemudian diberitakan di halaman website tersebut agar dapat dengan mudah dibaca dan diakses masyarakat. Akan tetapi pemerintah desa belum menyediakan halaman tersendiri untuk masyarakat dapat mengakses program yang telah direncanakan dan yang akan dilakukan.

Adapun dalam pemberian akses berita, pemerintah desa Caturtunggal telah menyediakan berita-berita kegiatan yang diupload rutin dalam waktu sebulan. Untuk akses aktifitas padukuhan dapat dilihat dalam laman berikut.

Gambar 3.3

Halaman Website Aktifitas Padukuhan Desa Caturtunggal



The screenshot shows a news article on the website www.caturtunggal.id. The article is titled "Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Peresmian Masjid Darussalam Kampung Puluhdadi Padukuhan Seturan Caturtunggal". The main image shows a group of men, including a police officer and several in traditional Indonesian attire, standing behind a table covered with a green cloth. The background features a banner with the text "PENGHAJIAN AKBAR". The article is dated 25 November 2018 and has been viewed 130 times. To the right of the main article, there is a sidebar with several smaller news items, including "Anjingsana dan Sambang Silaturahmi Kapolsek Depok Barat dengan Tokoh Masyarakat Padukuhan Ngentak dan Tambakbayan Caturtunggal", "Kunjungan Kapolsek Depok Barat Kepada Tokoh Masyarakat di Padukuhan Tempel dan Seturan", and "Pengukuhan Kelompok Masyarakat Seni Hadroh Azzahra Padukuhan Janti Oleh PASER Sleman".

(Sumber: <https://www.caturtunggal.id/>)

Selain laman aktifitas Padukuhan dalam ruang lingkup pemerintahan Desa Caturtunggal, terdapat pula laman agenda-agenda yang diseenggarakan. Dari beberapa penjelasan dilengkapi dengan data halaman-halaman website diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam penyediaan informasi dari pemerintah desa untuk masyarakat desa Caturtunggal telah baik dan maksimal namun tetap harus ditingkatkan dan dipertahankan. Masyarakat desa Caturtunggal telah menerima dengan baik upaya pemerintah dalam aspek transparansi informasi berbasis website. Hal tersebut sangat memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi seputar keadaan dan kegiatan desa kapan saja dan di mana saja secara cepat dan mudah.

b) Manajemen Keluhan

Manajemen keluhan merupakan sebuah gambaran ketidakpuasan suatu pelayanan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat. Dalam manajemen keluhan terhadap penggunaan layanan terdapat jenins-jenis keluhan tertentu. Beberapa keluhan yang sering terjadi yaitu keterlambatan proses pelayanan, petugas yang kurang ramah

dan kompeten, informasi yang tidak jelas serta terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam penyediaan layanan.

Menanggapi berbagai jenis keluhan yang disampaikan oleh publik sebaiknya langsung ditindaklanjuti pada saat keluhan diterima. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua keluhan publik dapat diproses dengan cepat, terkadang juga membutuhkan prosedur tertentu dalam menindaklanjuti keluhan tersebut. Manajemen keluhan biasanya dilakukan di berbagai tempat instansi. Baik pada instansi pemerintahan ataupun swasta.

Pemerintah desa Caturtunggal telah menerapkan manajemen keluhan. Seperti yang dijelaskan oleh kepala seksi pelayanan dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 07 Januari 2019, sebagai berikut.

“biasanya kita kalau sedang rembung warga atau rapat kordinasi dengan dukuh gitu mbak, masing – masing dukuh biasanya di dalam rapat menyampaikan keluh kesahnya warga, mau nya seperti apa, kadang juga ada yang bentuk tertulis seperti itu, kalau dirembung warga biasanya pemdes bersama warga secara face to face nanti setelah nya itu akan di tulis dalam notulen acara lalu disampaikan ke kepala desa seperti itu “

Berdasarkan pernyataan beliau di atas, dapat dipahami bahwa dalam manajemen keluhan yang dilakukan pemerintah desa Caturtunggal, diterapkan sistem face to face antara perangkat desa bersama warga. Kegiatan yang dilakukan tersebut bersifat rutin dalam rangka menyerap keluhan maupun aspirasi warga desa. Model manajemen keluhan yang dilakukan oleh pemerintah desa Caturtunggal tersebut bersifat langsung dan tertulis.


Bentuk manajemen keluhan secara tertulis telah diterapkan pemerintah desa Caturtunggal. Seperti yang dijelaskan oleh kepala seksi pelayanan dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 07 Januari 2019, sebagai berikut.

“Ya biasanya ada yang bentuk tertulis itu berupa surat yang biasanya surat itu nantinya dimasukkan ke dalam kotak keluhan, tapi sekarang kita belum pasang lagi kotak keluhan di karenakan kemaren habis renovasi jadi barang-barangnya masih tercecer dimana mana ya mungkin kalau semua sudah tertata lagi akan kami buat kotak keluhan untuk masyarakat, jadi sekarang untuk sementara ya secara langsung, tertulis seperti itu mbak “

Pernyataan dari wawancara tersebut menunjukkan bentuk penerapan manajemen keluhan. Pemerintah desa Caturtunggal memberikan akses kepada masyarakat dalam menyampaikan keluhannya secara tertulis yang kemudian harus dimasukkan ke dalam kotak keluhan. Berbagai keluhan yang disampaikan masyarakat tersebut nantinya akan ditindak lanjuti sebagai bentuk respon dari pemerintah desa.

Gambar 3.4
Bentuk notulen keluhan masyarakat

NOTULEN	
SAMBANG PADUKUHAN KLEDOKAN	
Hari, Tanggal	: Jumat, 04 Januari 2019
Waktu	: 06.30 - 09.30
Tempat	: Padukuhan Kledokan
Acara	: Sambang Padukuhan Kledokan.
Uraian Kegiatan	: Sambang padukuhan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan Pemerintah Desa Caturtunggal. Pada kegiatan saat ini dilakukan bersamaan dengan Peresmian Gedung PAUD dan Lapangan Bulutangkis Padukuhan Kledokan. Kegiatan ini diikuti oleh Bapak Camat Abubakar S. Sos., M. Si, Bapak Kepala Desa Caturtunggal Agus Santoso S. Psi, Ketua Bank BPD, Bapak Kapolsek Depok Barat, seluruh staff desa Caturtunggal, lembaga desa dan seluruh pengurus padukuhan Kledokan. Susunan acara sambang padukuhan Kledokan: Jalan sehat padukuhan Kledokan. Seluruh peserta berjalan bersama menyusuri wilayah Padukuhan Kledokan. Acara ini dilanjutkan peresmian gedung PAUD dan Lapangan Bulutangkis antara lain : Pembukaan, Sambutan oleh bapak Dukuh Kledokan, Bapak Supriyono. Laporan Pelaksanaan oleh Ketua Pembangunan Gedung PAUD dan Lapangan Bulutangkis, Bapak Triyono. Sambutan oleh Camat Depok, Bapak Abubakar, S. Sos., M. Si. Penyampaian Bantuan dari Pemerintah Desa Caturtunggal yang diserahkan oleh Kepala Desa Caturtunggal, Bapak Agus Santoso S. Psi. Kepada Dukuh Kledokan, Bapak Supriyono. Pembacaan Doa. Peresmian Gedung PAUD dan lapangan Bulutangkis, ditandai dengan pemotongan pita dan penandatanganan Prasasti Oleh Kepala Desa Caturtunggal, Agus Santoso S. Psi. Hiburan oleh anak TK dan PAUD Bina Anak Cerdas. Dalam sambutan Bapak Camat mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa Caturtunggal karena sudah memfasilitasi padukuhan Kledokan dalam hal Olahraga dan Pendidikan khususnya pendidikan anak usia dini. Semoga Gedung ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat luas, khususnya masyarakat kledokan.
Penutup	: Kegiatan ini berjalan dengan lancar dan di tutup dengan hiburan dari anak-anak PAUD dan TK Bina Anak Cerdas Padukuhan Kledokan.

Caturtunggal, 04 Januari 2019
Notulis

Irma Wulandari

(sumber : Notulen Desa Caturtunggal)

Gambar di atas menunjukkan ketika masyarakat memberikan bentuk keluhan kepada pemerintah desa, maka secara langsung akan dijadwalkan agenda sambang padukuhan untuk menanggapi berbagai keluhan oleh masyarakat. Hal ini merupakan upaya pemerintah desa Caturtunggal dalam menanggapi berbagai system keluhan masyarakat untuk mengoptimalkan manajemen keluhan yang dilakukan.

Dari berbagai upaya pemerintah desa Caturtunggal tersebut, tentu terdapat kendala-kendala yang mempengaruhi aspek akuntabilitas yang dilakukan khususnya kaitannya dalam manajemen keluhan. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Seksi Pelayanan dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 06 Januari 2019, sebagai berikut.

“Ya semua nya kami terapkan mbak, tapi kalau tatap muka kadang suka terhalang keterbatasan waktu dan tempat dari biasanya lewat surat tertulis begitu masyarakat menyampaikan keluh kesahnya, kadang juga lewat email ada, lewat fb juga mereka menyampaikan keluh kesahnya”

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa pemerintah desa Caturtunggal juga telah menyediakan media berbasis teknologi seperti email ataupun facebook sebagai wadah penyampaian keluhan oleh masyarakat. Hal tersebut dilakukan ketika penyerapan keluhan dan aspirasi secara face to face terkendala waktu dan keadaan, maka alternatif yang diberikan yaitu dapat menyampaikan keluhan dari media elektronik.

Beberapa penjelasan diatas tentang manajemen keluhan yang dilakukan oleh pemerintah desa Caturtunggal dapat disimpulkan bahwa dalam mekanisme akuntabilitas dalam parameter manajemen keluhan telah dilakukan dengan baik oleh pemerintah desa. Dengan menyelenggarakan pertemuan bersama warga dalam rangka menyerap keluhan dan aspirasi warga secara langsung, penyediaan kotak keluhan serta penyerapan keluhan berbasis media elektronik seperti email dan facebook.

C. Sinergitas Masyarakat Dalam Akuntabilitas Sosial

a) Peranan Karang Taruna

Karang taruna pada hakekatnya adalah wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda demi terwujudnya kesejahteraan generasi muda. Karang Taruna mengemban misi tulus, ikhlas dan penuh rasa manusiawi dalam upaya mengatasi segala

bentuk permasalahan generasi muda. Sehingga peranan karang taruna senantiasa dibutuhkan kapanpun, di manapun demi terwujudnya masa depan yang lebih cerah bagi generasimuda, bangsa dan negara dan seluruh masyarakat Indonesia.

Berpedoman pada pengertian di atas maka Karang taruna, yaitu: a. Wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda. b. Tumbuh atas kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial. c. Bergerak terutama dalam bidang kesejahteraan sosial. d. Secara fungsionaldibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.

Dalam pemerintahan desa Caturtunggal, peranan Karang Taruna dibutuhkan dalam membantu pembangunan desa Caturtunggal. Seperti yang dijelaskan dalam wawancara pada tanggal 06 Januari 2019, sebagai berikut.

“Itu pasti, karena perda yang ada di kab. Sleman itu menjelaskan bahwa yang namanya lembaga desa itu salah satunya karang taruna, karang taruna itu berperan penting dalam proses pembangunan yang ada didesa, maka dari itu karang taruna harus bersinergitas dalam membangun desa. Kemarin juga kita sudah ada pertemuan di MoU kedepannya kita akan membuat sub unit karang taruna di setiap padukuhan, sehingga nanti diharapkan karang taruna dapat bisa mmbantu program atau kegiatan yang ada di desa.”

Dari penjelasan diatas, dapat dijelaskan bahwa peranan Karang Taruna sangat dibutuhkan oleh pemerintah desa Caturtunggal. Telah disusun MoU tentang keberadaan Karang Taruna terhadap pemerintahan desa agar dapat memperjelas tugas pokok dan fungsinya. Hal tersebut juga dalam rangka sinergitas antara pemuda desa dengan pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan desa.

Peranan karang taruna yang telah dilaksanakan pada desa Caturtunggal dapat dilihat dalam tabel alokasi dana karang taruna Tahun 2017, sebagai berikut.

Tabel 3.3
Alokasi Dana Karang Taruna Tahun 2017

No	Kegiatan	Pelaksanaan	Anggaran
----	----------	-------------	----------

1.	Belanja peralatan olahraga (voly,badminton,tenis)	Januari	2.500.000,00
2.	Bakti sosial dan pengobatan gratis	Maret	1.300.000,00
3.	Penyuluhan Narkoba & pelatihan LDK karang taruna	April	900.000,00
4.	Pembenahan lapangan voly	April	550.000,00
5.	Pengajuan pengadaan lampu serba guna untuk keadaan darurat	Juli	500.000,00
6.	Peringatan Hari kemerdekaan RI ke 72	Agustus	600.000,00
	TOTAL		6.350.000,00

(Sumber: Karang Taruna Bhakti Muda 2017)

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan karang taruna di desa Caturtunggal telah disusun secara terorganisir perbulan kegiatannya. Dihilangkan sebesar Rp6.350.000 untuk biaya pelaksanaan kegiatan karang taruna yang bersinergi dengan pemerintah dalam kepentingan masyarakat desa Caturtunggal.

Dari berbagai kegiatan tersebutlah karang taruna melaksanakan peranannya yaitu bersinergi kepada masyarakat dan pemerintah desa dalam rangka pembangunan masyarakat. Terdapat kegiatan-kegiatan yang bersifat pembangunan fisik seperti sarana prasarana maupun pembangunan nonfisik seperti pemberian edukasi dan pelatihan.

b) Peranan Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat merupakan beberapa orang yang berada di dalam masyarakat biasanya ada orang-orang tertentu yang menjadi tempat bertanya dan tempat meminta nasehat anggota masyarakat lainnya mengenai urusan-urusan tertentu. Mereka memiliki

kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk bertindak dalam hal tertentu. Tokoh Masyarakat itu menduduki jabatan formal, tetapi berpengaruh secara informal, pengaruh itu tumbuh bukan karena ditunjang oleh kekuatan atau birokrasi formal.

Tokoh masyarakat mampu menempatkan peranannya sebagai wadah penyerapan aspirasi warga desa ketika mereka dibutuhkan biasanya dalam pertemuan bersama orang-orang penting di desa ataupun pemerintah desa. Seperti yang dijelaskan dalam wawancara bersama staff pelayanan pemerintah desa Caturtunggal pada tanggal 07 Januari 2019, sebagai berikut.

“Kita disini ada kewajiban memberikan ruang kepada tokoh masyarakat itu dalam setiap pengambilan kebijakan atau keputusan, misalnya dalam musdes kita juga di haruskan untuk mengundang tokoh tokoh masyarakat dimana nantinya tokoh masyarakat ini menjadi kontroling bagi setiap kebijakan yang sudah diambil.”

Dari pernyataan dalam wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa keberadaan tokoh masyarakat memang dipentingkan dalam setiap kegiatan yang dilakukan pada desa Caturtunggal. Penyelenggaraan pembangunan direncanakan dengan musyawarah desa juga mempertimbangan pendapat dan masukan dari tokoh masyarakat. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menempatkan tokoh masyarakat sebagai salah satu instrument kontroling dalam setiap kebijakan dan program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Gambar 3.5
Bentuk tokoh masyarakat sebagai kontrol



(Sumber: www.Desacaturtunggal.id)

Peranan tokoh masyarakat sebagai instrument kontroling dalam pelaksanaan pemerintahan desa juga ditanggapi baik oleh salah satu tokoh masyarakat desa Caturtunggal dalam wawancara pada tanggal 06 Januari 2019, sebagai berikut.

“Ya bnar mbak atas apa yang disampaikan oleh mbak Irma, biasanya kita ikut serta dalam pengambilan keputusan, biasa juga ketika desa mau bikin program kita diundang dan diberikan ruang untuk tokoh masyarakat.”

Dari pendapat salah satu tokoh masyarakat tersebut, dapat dipahami dan disimpulkan bahwa tokoh masyarakat merupakan beberapa orang yang tergolong dapat mempengaruhi orang lain atas keberadaan dirinya dalam suatu tempat khususnya di desa Caturtunggal. Peranan tokoh masyarakat juga menjadi salah unsur instrument kontroling penyelenggaraan pemerintahan desa.

c) Peranan RT dan RW

Pemerintah desa merupakan pemegang kendali dalam pembangunan di wilayah Desa. Atas dasar tersebut, Kepala Desa beserta Perangkat Desa merupakan penanggung

jawab atas jalannya roda pemerintahan dan roda pembangunan sehingga maju mundurnya pembangunan di Desa tergantung dari kinerja Perangkat Desa dalam mempengaruhi masyarakatnya untuk turut serta di dalam pembangunan.

Perangkat Desa dan Kepala Desa Caturtunggal benar-benar telah melakukan kerjasama antar pemerintah dan warga masyarakat untuk kegiatan peningkatan kesejahteraan dan ini juga erat kaitannya dengan pembangunan yang bersifat non fisik. Bahkan Kepala Desa dan Perangkatnya dengan caranya sendiri untuk bisa mempengaruhi atau membujuk masyarakatnya dalam peningkatan kesejahteraan. Sehingga masyarakat memperoleh berbagai manfaat di bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Seperti yang telah dijelaskan dalam wawancara bersama staff pelayanan pemerintah desa pada tanggal 07 Januari 2019, sebagai berikut.

“Ya RT dan RW sangat membantu sekali pemerintah desa. Kita juga gak bisa melepaskan peran RT dan RW begitu aja karna merekalah yang mempunyai kedekatan dengan masyarakatnya.”

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa perangkat desa daam hal ini RT dan RW dibutuhkan peranannya dalam penyelenggaraan desa dikarenakan mereka perangkat desa yang paling dekat dengan masyarakat. Manfaat yang diperoleh dari peranan perangkat desa dapat diuraikan antara lain; meningkatkan pengetahuan, penguasaan teknologi, meningkatkan keterampilan dan kreativitas sehingga memberi nilai tambah usaha, dan juga memperluas jejaring komunikasi dan silaturahmi antar warga mengingat kegiatan yang dilaksanakan terpusat di kantor Desa. Kesemua ini merupakan hal gerakan ke arah kemajuan, dengan demikian erat kaitannya dengan pembangunan.

Tabel 3.5

Bentuk Pendataan Remaja

FORMULIR PENDATAA REMAJA						
(USIA 10-19 TAHUN, BERDOMISILI DI CATURTUNGGAL MINIMAL 6 BULAN BERTURUT-TURUT)						
DESA CATURTUNGGAL, KECAMATAN DEPOK ,KABUPATEN SLEMAN,DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2017						
DUSUN		: MANGGUNG		PETUGAS : IBU RUBIYANTO (RT 08)		
POSYANDU : POSYANDU PADMA						
NO	NAMA LENGKAP	TANGGAL LAHIR	UMUR	J.KELAMIN		KETERANGAN
				L	P	
1.	FAUZI FIRMANSYAH	20-7-2006	10 TH	L		
2	MUH. EKO PRASETYO	20-6-1997	20 TH	L		
3	AHMAD FUAD BIMA P.	07-4-1998	19 TH	L		
4	SILVIA OCKTA F.	05-10-2006	10 TH		P	
5	AIKO ADINDA	24-07-2003	13 TH		P	
6	DINDA RONA A.	01-5-2000	16 TH		P	
7	SHEVA PANGESTIKA	11-9-1999	17 TH		P	
8	RIMA NURJANNAH N.	3-10-2002	15 TH		P	
9	ANISA AZZAHRA N.	24-1-2006	11 TH		P	

(Sumber : Arsip RT 08 Manggung)

Perangkat Desa dalam menyikapi hal ini bisa terbantu dengan bantuan dana dari pemerintah. Kepala Desa pun selalu bersikap transparan baik masalah pembangunan maupun masalah bantuan yang didapatkan, hal ini sesuai dengan prinsip pengelolaan pembangunan

desa dan Desa. Hampir semua bantuan yang masuk itu dikelola secara demokratis. Sebagaimana yang diungkapkan oleh aparat Desa bahwa walaupun tidak diadakan rapat secara formal namun koordinasi antar aparat, kepala lingkungan, lembaga kemasyarakatan, dan warga selalu terjalin.

D. Respon Pemerintah

a) Respon Positif

Respon positif merupakan respon yang dapat langsung ditindak lanjuti oleh Pemerintah Desa dengan baik. Dalam respon positif ini hanya berupa tanggapan yang baik dan bijaksana oleh pemerintah desa atas keluhan ataupun aspirasi masyarakat. Pemerintah desa Caturtunggal selalu memberikan respon positif dalam kegiatan penyerapan aspirasi yang biasa dilakukan dalam bentuk musyawarah desa. Seperti yang dijelaskan dalam hasil wawancara bersama kepala seksi pelayanan pemerintah desa Caturtunggal pada tanggal 07 Januari 2019, sebagai berikut.

“Biasanya kalau lagi forum gitu banyak yang mengungkapkan persepsinya masing-masing ya biasanya bapak kepala desa mendengarkan tentang apa yang diinginkan oleh mereka tapi ya kembali lagi semua nya butuh pertimbangan dulu baru diputuskan. Kita belum bisa langsung untuk bertindak semua ada proses prosedurnya yang berlaku. Ya maunya masyarakat langsung ada action tapi semua kembali lagi ada regulasi kebijakannya yang harus kami pertimbangkan dahulu.”

Dari pernyataan diatas, dapat dipahami bahwa dalam pemberian respon positif oleh pemerintah kepada masyarakat selalu dilakukan dan diupayakan. Namun dalam urusan tindak lanjut perlu pertimbangan kembali atas hal-hal yang disampaikan dalam forum penyerapan keluhan dan aspirasi tersebut. Tindak lanjut yang dilakukan pemerintah tidak bisa dilakukan secepat dan semudah yang terlihat. Perlu pertimbangan dan perangkingan untuk dilanjutkan menjadi RPJMDesa dan tentunya dengan beberapa

kali musdes-musdes yang dilakukan. Hal tersebut sesuai dengan yang dipaparkan oleh salah satu masyarakat desa dalam wawancara pada tanggal 06 Januari 2019, sebagai berikut.

“Biasanya pak kepala mendengarkan dulu keluhan masyarakatnya, kalau keterbatasan waktu nulis dikertas nanti pak lurah baca, lalu kalau missal dikabulkan nnti dari pemdes nya mengadakan pertemuan untuk membahas masalah itu dan mencari solusi.”

Gambar 3.6

Bentuk Respon Positif Pemdes Pemberian Bantuan



(Sumber : www.caturtunggal.id)

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa mekanisme akuntabilitas dalam pemberian respon positif oleh pemerintah desa kepada masyarakat telah dilakukan pada setiap pertemuan forum penyerapan keluhan atau aspirasi bersama masyarakat. Namun dalam penindak lanjutan berbagai keluhan atau aspirasi harus dipertimbangkan terlebih dahulu sehingga untuk tindak lanjut secara langsung belum dapat dilakukan mengingat harus mengukur prioritas dari keluhan ataupun aspirasi untuk dijadikan kebijakan yang efektif dan efisien

a. Respon Kebijakan

Respon kebijakan merupakan respon yang memerlukan pertimbangan kebijakan yang telah dibuat dan mendapatkan feedback langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Dalam respon kebijakan biasanya pemerintah desa telah menerima aspirasi yang telah disaring dan dirankingkan untuk dijadikan kebijakan. Respon kebijakan nantinya akan disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk tindaklanjut dari semua keluhan dan aspirasi yang mereka sampaikan.

Hal tersebut juga disampaikan oleh kepala seksi pelayanan dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 07 Januari 2019, sebagai berikut.

“Ya saya pikir semua nya diputuskan dengan kebijakan ya mbak jadi gak ya semena mena gitu dalam merespon apa yang diinginkan oleh masyarakat, perlu ada nya pertimbangan dulu baru diputuskan.”

Pernyataan diatas dapat dipahami bahwa pemerintah desa tidak bisa tergesa-gesa dalam membuat kebijakan atas semua keinginan dan keluhan masyarakat. Perlu pertimbangan yang matang ketika kebijakan tersebut berupa kebijakan pembangunan ataupun kebijakan peraturan. Penerapan kebijakan pun melibatkan banyak pihak, maka dari itu dalam penerapan respon kebijakan memerlukan waktu yang cukup panjang mengingat pentingnya pertimbangan yang matang dan terperinci untuk kepentingan masyarakat desa.

Dari beberapa penjelasan di atas tentang respon kebijakan, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Caturtunggal dalam memberikan respon kebijakan terhadap aspirasi ataupun keluhan masyarakat tetap perlu pertimbangan yang jauh dan matang. Hal

tersebut tidak dapat sewaktu-waktu dibuat kebijakan mengingat impelementasinya untuk masyarakat dan kepentingan publik